

# IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT (STUDI PADA PELAKSANAAN PROGRAM NASIONAL PEMBERDAYAAN MASYARAKAT (PNPM) MANDIRI PERKOTAAN DI KECAMATAN BATU KOTA BATU)

**Fauziah Yuni Aran Tika, Imam Hanafi, Riyanto**

Jurusan Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Administrasi, Universitas Brawijaya, Malang  
e-mail: fauziahyuni.arantika@gmail.com

**Abstract:** *Impelementation of the Community Empowerment Policy. Batu district as one of the districts that are still experiencing rising numbers of Poor Households (RTM). According to data from the 2008 BPS Batu number of Poor Households (RTM) is much reduced compared to the population census conducted in 2005. Poverty reduction is only happening in the District Bumiaji, while for Batu and Junrejo districts actually experienced an increase in poverty. The purpose of this study is to analyze the implementation of PNPM Urban and factors supporting and inhibiting factors related to the implementation of PNPM Urban at Batu District. This research uses a qualitative with deskriptif approach. Collection techniques used include using the method of observation, interviews, and documentation. Results of the study indicate that the program has run an active and independent and positive impact on the members of society, but in the implementation process goes poorly because many obstacles that arise in the community.*

**Keywords:** *PNPM Mandiri Perkotaan, Implementation, Policy*

**Abstrak:** **Implementasi Kebijakan Pemberdayaan Masyarakat.** Kecamatan Batu Kota Batu sebagai salah satu kecamatan yang masih mengalami kenaikan angka Rumah Tangga Miskin (RTM). Menurut data dari BPS Kota Batu tahun 2008 jumlah Rumah Tangga Miskin (RTM) sudah banyak berkurang dibandingkan sensus penduduk yang dilakukan pada tahun 2005. Penurunan angka kemiskinan ini hanya terjadi di Kecamatan Bumiaji, sedangkan untuk Kecamatan Junrejo dan Kecamatan Batu justru mengalami kenaikan angka kemiskinan. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis implementasi PNPM Mandiri Perkotaan dan faktor pendukung serta faktor penghambat terkait implementasi PNPM Mandiri Perkotaan di Kecamatan Batu Kota Batu. Penelitian ini menggunakan jenis deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Teknik pengumpulan yang digunakan antara lain menggunakan metode observasi, interview, dan dokumentasi. Hasil dari penelitian menunjukkan bahwa PNPM Mandiri telah dijalankan secara aktif dan mandiri serta member dampak yang positif bagi masyarakat, namun dalam proses implementasinya berjalan dengan kurang baik sebab banyak kendala yang muncul didalam masyarakat.

**Kata Kunci:** PNPM Mandiri Perkotaan, Implementasi, Kebijakan, Rumah Tangga Miskin (RTM)

---

## Pendahuluan

Indonesia adalah salah satu negara berkembang yang masih memiliki banyak permasalahan dalam hal pembangunan bangsa. Suatu pembangunan dapat dikatakan berhasil ketika masyarakat dalam suatu

wilayah tersebut dapat dikategorikan sejahtera. Meningkatkan kesejahteraan masyarakat adalah tugas pemerintah Indonesia yang harus segera diwujudkan. Kemiskinan yang ada di Indonesia merupakan masalah yang kompleks dan multi dimensi. Selama ini,

kegagalan dalam penanggulangan kemiskinan di Indonesia disebabkan karena lebih mempergunakan pendekatan yang lebih bersifat “proyek” dan “bantuan” sehingga tidak memberdayakan masyarakat.

Parsudi Suparlan (1984, h.5) mengemukakan bahwa “Masalah kemiskinan di perkotaan merupakan masalah laten dan kompleks yang implikasi sosial dan kebudayaannya bukan hanya melibatkan dan mewujudkan berbagai masalah sosial yang ada di kota yang bersangkutan saja atau menjadi masalah orang miskin di kota tersebut, tetapi juga melibatkan masalah-masalah sosial yang ada di perdesaan”. Terkait dengan masalah kemiskinan, menurut data dari BPS tahun 2008 bahwa jumlah Rumah Tangga Miskin (RTM) di Kota Batu mencapai 5817. Angka ini sudah jauh berkurang dibandingkan data BPS pada tahun 2005 yang mencapai 6005 RTM. Namun penurunan angka kemiskinan ini hanya terjadi pada satu kecamatan saja yakni Kecamatan Bumiaji, sedangkan untuk Kecamatan Junrejo dan Kecamatan Batu justru mengalami kenaikan angka RTM. Salah satu cara yang dilakukan pemerintah Kota Batu dalam menanggulangi kemiskinan adalah dengan adanya Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Perkotaan. Penganggulangan kemiskinan melalui PNPM Mandiri Perkotaan dilakukan dengan memberdayakan masyarakat melalui tiga jenis kegiatan pokok yaitu lingkungan/fisik, sosial dan ekonomi yang dikenal dengan Tridaya. Disinilah tujuan pemerintah dalam menumbuhkembangkan partisipasi kelompok masyarakat sosial untuk ikut serta berkeinginan mengubah keadaan perekonomian yang lebih baik dan pembangunan yang dinilai mampu mengangkat penduduk yang hidup dibawah garis kemiskinan. Maka keberfungsian sosial disini yang menjadi tujuan utama untuk menciptakan ekonomi kerakyatan yang lebih baik dan sesuai dengan keinginan masyarakat. Oleh karena itu, didalam penelitian ini mengangkat judul yaitu Implementasi Kebijakan

Pemberdayaan Masyarakat (Studi Pada Pelaksanaan PNPM Mandiri Perkotaan di Kecamatan Batu Kota Batu).

### **Tinjauan pustaka**

**Implementasi kebijakan** menurut Riant Nugroho D. (2003, h.158) pada prinsipnya adalah cara agar sebuah kebijakan dapat mencapai tujuannya. Tidak lebih dan tidak kurang untuk mengimplementasikan kebijakan publik, maka ada dua pilihan langkah yang ada, yaitu langsung mengimplementasikan dalam bentuk program-program atau melalui formulasi kebijakan derivat atau turunan dari kebijakan publik tersebut. Implementasi kebijakan ialah tindakan-tindakan yang dilakukan baik oleh individu-individu/pejabat-pejabat atau ke-lompok-kelompok pemerintah atau swasta yang diarahkan pada tercapainya tujuan-tujuan yang telah digariskan dalam keputusan kebijaksanaan.

Implementasi kebijakan haruslah menampilkan keefektifan dari kebijakan itu sendiri. Menurut Nugroho (2003, h.179) ada “4 (empat) tepat” yang perlu dipenuhi dalam hal keefektifan implementasi kebijakan, yaitu:

- a. Apakah kebijakannya sendiri sudah tepat. Ketepatan kebijakan ini dinilai dari sejauh mana kebijakan yang ada telah bermuatan hal-hal yang memang memecahkan masalah yang hendak dipecahkan.
- b. “Tepat pelaksanaannya”, aktor implementasi kebijakan tidaklah hanya pemerintah. Ada tiga lembaga yang dapat menjadi pelaksana, yaitu pemerintah, kerjasama antara pemerintah-masyarakat/swasta, atau implementasi kebijakan yang diswastakan.
- c. “Tepat target”, ketepatan berkenaan dengan tiga hal. Pertama, apakah target yang diintervensi sesuai dengan yang direncanakan, apakah tidak ada tumpang tindih dengan intervensi lain, atau tidak bertentangan dengan intervensi kebijakan lain. Kedua, apakah targetnya dalam kondisi siap untuk diintervensi atau tidak. Ketiga, apakah intervensi imple-

mentasi kebijakan bersifat baru atau memperbaharui implementasi kebijakan sebelumnya.

- d. “Tepat lingkungan”. Ada dua lingkungan yang paling menentukan, yaitu lingkungan kebijakan, yaitu interaksi diantara lembaga perumus kebijakan dan pelaksana kebijakan dengan lembaga lain yang terkait.

Keempat “tepat” tersebut masih perlu didukung oleh tiga jenis dukungan, yaitu dukungan politik, dukungan strategi, dan dukungan teknis.

### **Metode penelitian**

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Denzin dan Lincoln dalam Moleong (2004, h.5) menyatakan bahwa penelitian kualitatif adalah penelitian yang menggunakan latar alamiah, dengan maksud menafsirkan fenomena yang terjadi dan dilakukan dengan jalan melibatkan berbagai metode yang ada.

Penelitian kualitatif didasarkan pada upaya membangun pandangan mereka yang diteliti yang rinci, dibentuk dengan kata-kata, gambaran holistik dan rumit. Penelitian dengan pendekatan kualitatif adalah penelitian yang bermaksud untuk memahami fenomena tentang apa yang dialami oleh subjek penelitian misalnya perilaku, persepsi, motivasi, tindakan, dan lain-lain secara holistik, dan dengan cara deskripsi dalam bentuk kata-kata dan bahasa, pada suatu konteks khusus yang alamiah dan dengan memanfaatkan berbagai metode alamiah (Moleong, 2004, h.6).

Dalam penelitian ini, peneliti mencoba memberikan batasan fokus penelitian antara lain pelaksanaan kegiatan tridaya dalam PNPM Mandiri Perkotaan, peran aktor pemberdaya dalam implementasi PNPM Mandiri Perkotaan yaitu peran BKM/LKM serta peran pemerintah daerah, ketepatan PNPM Mandiri Perkotaan dalam keefektifan implementasi kebijakan, serta faktor

penghambat dan faktor pendukung dalam implementasi PNPM Mandiri Perkotaan di Kecamatan Batu Kota Batu.

Peneliti mengambil lokasi penelitian di Kecamatan Batu Kota Batu. Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini melalui *observasi* (pengamatan), *interview* (wawancara), dan dokumentasi. Adapun sumber dan jenis data dalam penelitian ini yang terdiri dari data primer dan data sekunder. Data primer merupakan data yang diperoleh secara langsung dari responden berupa kata-kata dan tindakan orang-orang yang diamati atau diwawancara. Sedangkan data sekunder berupa dokumen-dokumen, catatan-catatan, arsip-arsip, peraturan-peraturan yang digunakan dalam pelaksanaan PNPM Mandiri Perkotaan di Kecamatan Batu Kota Batu.

Sesuai dengan penelitian ini, maka analisis data ini dilakukan bersamaan dengan proses pengumpulan data diantaranya adalah melalui tiga tahap model alir. Yaitu reduksi data, penyajian data, dan verifikasi.

### **Pembahasan**

#### **Implementasi kegiatan Tiday dalam PNPM Mandiri Perkotaan di Kecamatan Batu Kota Batu**

Dalam pelaksanaannya PNPM Mandiri Perkotaan di Kecamatan Batu telah melaksanakan kegiatan Tiday yang terdiri dari kegiatan (daya fisik/lingkungan, daya ekonomi, dan daya sosial). Kegiatan lingkungan/fisik diwujudkan dengan kegiatan pembangunan infrastruktur desa/kelurahan, rehab/perbaikan rumah warga miskin tidak layak huni, dan kegiatan-kegiatan pelestarian lingkungan. Kegiatan ekonomi bergulir yaitu bagi warga yang mempunyai usaha dan tidak mendapatkan akses pinjaman dana dari bank atau lembaga lainnya. Dana yang telah dianggarkan oleh warga setempat kemudian disetujui oleh pemerintah sehingga dana dapat turun dan kemudian disebarkan kepada masyarakat dan dikembangkan bersama. Kegiatan tridaya didalam PNPM Mandiri

Perkotaan yang terakhir adalah kegiatan sosial yang diwujudkan dengan pemberian pelatihan-pelatihan kepada warga, pemerian beasiswa, peningkatan kualitas kesehatan dan pendidikan, dan lain sebagainya. Banyak sekali manfaat yang diperoleh warga miskin dari kegiatan sosial ini. Karena kegiatan sosial yang dilaksanakan dirasa tepat sasaran sesuai dengan tujuan program.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa masih banyak masalah yang timbul didalam pelaksanaan kegiatan tridaya di Kecamatan Batu Kota Batu yang antara lain adalah:

- a) Banyak masyarakat menganggap dana dari PNPM Mandiri Perkotaan adalah dana bantuan dari pemerintah yang diberikan secara cuma-cuma sehingga tidak perlu dikembalikan. Hal ini berdampak pada pengembalian atau pengangsuran dana yang macet sehingga dana ekonomi bergulir yang dikelola oleh UPK tidak dapat dikembangkan.
- b) Penetapan besar bunga yang dibebankan kepada masing-masing penerima manfaat tidak sama. Hal ini juga menimbulkan masalah bagi warga miskin yang kebetulan mendapatkan beban bunga lebih tinggi dibandingkan wilayah lain.
- c) Pemberian pelatihan yang diadakan oleh Unit Pengelola Sosial (UPS) terkadang kurang sesuai dengan sumberdaya dan peluang yang ada didalam masyarakat disuatu wilayah. Hal ini membuat pelatihan-pelatihan yang diberikan dirasa percuma sebab tidak dipergunakan.

**a. Peran aktor pemberdayaan masyarakat dalam PNPM Mandiri Perkotaan di Kecamatan Batu Kota Batu**

**1. Peran Badan Keswadayaan Masyarakat (BKM)/Lembaga Keswadayaan Masyarakat (LKM) dalam pelaksanaan PNPM Mandiri Perkotaan di Kecamatan Batu Kota Batu.**

Menurut buku pedoman pelaksanaan PNPM Mandiri Perkotaan disebutkan bahwa

Dalam implementasi PNPM Mandiri Perkotaan, program ini telah menyiapkan landasan kemandirian masyarakat berupa BKM dan LKM yang representatif, mengakar dan dapat diper-caya. Badan/Lembaga ini dibentuk mela-lui kesadaran kritis masyarakat untuk menggali kembali nilai-nilai luhur kemanusiaan dan nilai-nilai kemasya-rakatan. Dengan demikian, BKM/LKM ini diharapkan mampu menjadi wadah perjuangan kaum miskin dalam menyuarakan aspirasi dan kebutuhan mereka, sekaligus menjadi motor bagi upaya penanggulangan kemiskinan yang dijalankan oleh masyarakat secara mandiri dan berkelanjutan, mulai dari proses penentuan kebutuhan, pengambilan keputusan, proses penyusunan program, pelaksanaan program hingga pemanfaatan dan pemeliharaan.

Dalam implementasinya, peran lembaga BKM/LKM untuk PNPM Mandiri Perkotaan di Kecamatan Batu Kota Batu telah memenuhi tahapan-tahapan sebagai berikut:

- a) Membentuk sebuah lembaga sebagai wadah pelaksanaan PNPM Mandiri Perkotaan di Kecamatan Batu Kota Batu. Hal ini bertujuan agar lebih mudah memberikan pelayanan yang baik kepada warga dan KSM yang telah dibentuk, membangun transparansi dan akuntabilitas, serta sebagai acuan operasional organisasi.
- b) Dalam pelaksanaannya BKM/LKM di masing-masing desa/kelurahan yang ada di Kecamatan Batu melaksanakan pertemuan rutin dengan para warga untuk mendiskusikan masalah-masalah yang terjadi dan setiap tahunnya BKM/LKM bersama-sama dengan warga membuat suatu perencanaan jangka menengah untuk kegiatan yang akan direalisasikan melalui PNPM Mandiri Perkotaan.
- c) Dalam melaksanakan kegiatan PNPM Mandiri Perkotaan, BKM/LKM bersama warga akan memilih masalah berdasarkan permasalahan yang paling mendesak dan yang paling penting.

- d) Program pemberdayaan masyarakat melalui PNPM Mandiri Perkotaan di Kecamatan Batu bertujuan meningkatkan kesejahteraan masyarakat dari pemerintah hanya akan berhasil apa-bila seluruh masyarakat mempunyai potensi dan keinginan yang besar serta kuat untuk merubahnya, hal ini dapat terwujud karena masyarakat Kota Batu memiliki motivasi yang kuat untuk berubah dan partisipasi yang besar.
- e) Rencana-rencana yang telah dibuat oleh BKM/LKM bersama warga masyarakat setempat kemudian di implementasikan melalui keswa-dayaan masyarakat dan hasilnya di manfaatkan oleh masyarakat setempat pula.

Berbagai kegiatan didalam PNPM Mandiri seperti sosialisai, penyusunan PJM atau Renta Pronangkis, pembentukan/pengorganisasian KSM, dan lain sebagainya merupakan bagian dari pro-ses pemberdayaan masyarakat. Masyarakat diberdayakan untuk memajukan usahanya. Sesuai dengan pernyataan Shardlow (1998, h.32) dalam Adi (2008, h.78) melihat bahwa berbagai pengertian yang ada mengenai pemberdayaan, pada intinya membahas bagaimana individu, kelompok, maupun komunitas berusaha mengontrol kehidupan mereka sendiri dan mengusahakan untuk membentuk masa depan sesuai dengan keinginan mereka.

Dalam pelaksanaannya BKM/LKM masih banyak mengalami kendala dan masalah yang antara lain adalah:

- a) Pada saat pemilihan dan pembentukan kepengurusan, proses pemilihan pengurus bersifat asal-asalan, dalam artian asal memilih warga untuk dijadikan pengurus PNPM Mandiri Perkotaan. Hal ini membuat pengurus yang ditunjuk kurang berkompeten dibidangnya, sehingga kurang mampu melaksanakan program kegiatan dengan baik.

- b) Seringkali pengurus sibuk dengan urusan pribadinya, sehingga tidak terlalu mengurus dan menjalankan program. Banyak ditemui fakta dilapangan bahwa masyarakat yang ditunjuk sebagai pengurus hanya sekedar nama, namun kehadiran dan partisipasi sangat kurang dalam pelaksanaan program.

### **Peran Pemerintah dalam Pelaksanaan PNPM Mandiri Perkotaan di Kecamatan Batu Kota Batu.**

Kunci utama dari upaya penanggulangan kemiskinan dan pembangunan adalah terbangunnya lembaga jaringan komunikasi, koordinasi dan kerjasama antara ketiga pilar pembangunan setempat, yakni pemerintah kota/kabupaten, masyarakat dan kelompok peduli (LSM, swasta, perguruan tinggi, ulama, pers, dan lain sebagainya). Dalam implementasi PNPM Mandiri Perkotaan di Kec. Batu, pemerintah juga mempunyai peran yang penting. Meskipun program ini menggunakan pendekatan pemberdayaan masyarakat yang hampir seluruh kegiatannya dilaksanakan oleh masyarakat, namun dalam memunculkan partisipasi dan pengawasan pelaksanaan program tentu-nya dilakukan oleh pemerintah. Hal ini dilakukan agar terhindar dari faktor-faktor penyimpangan nilai-nilai luhur yang melandasi keberadaan PNPM Mandiri Perkotaan. Oleh sebab itu sangat diperlukan peran pemerintah sebagai pendampingan pelaksanaan program yang berorientasi pada upaya membangun dan mengembangkan PNPM Mandiri Perkotaan hingga mencapai keberhasilan, yakni kesejahteraan masyarakat Kec. Batu Kota Batu.

### **Ketepatan (PNPM) Mandiri Perkotaan dalam Keefektifan Implementasi Kebijakan.**

Dalam memilih model implementasi kebijakan menurut Riant Nugroho D. (2003, h.179) ada “4 (empat) tepat” yang perlu dipenuhi dalam hal keefektifan implementasi kebijakan, yaitu (ketepatan kebijakan, tepat pelaksanaan, tepat target, dan tepat lingkungan).

a. Tepat Kebijakan

Adanya program layaknya PNPM Mandiri Perkotaan ini dibutuhkan untuk memecahkan permasalahan kemiskinan di Indonesia. Selama ini program dari pemerintah hanya memberikan bantuan tanpa adanya usaha untuk merubah pola pikir masyarakat miskin, sehingga masyarakat miskin hanya menunggu bantuan dari pemerintah tanpa adanya usaha untuk sejahtera.

b. Tepat Pelaksanaan

PNPM Mandiri pada dasarnya adalah program yang mengajak masyarakat untuk merancang dan menyetujui agenda pembangunan mereka sendiri dengan melibatkan masyarakat dalam pengambilan keputusan. Dalam implementasi PNPM Mandiri Perkotaan di Kecamatan Batu Kota Batu, masyarakat telah membuat usulan kegiatan pembangunan berdasarkan kebijakan yang paling mendesak dan disesuaikan dengan konteks yang berlaku untuk memecahkan masalah kemiskinan di Kecamatan Batu Kota Batu. Maka PNPM Mandiri Perkotaan menjadi program yang tepat dilaksanakan di Kec. Batu Kota Batu.

c. Tepat Sasaran

Pada dasarnya target PNPM Mandiri adalah penanggulangan kemiskinan. PNPM Mandiri Perkotaan di Kecamatan Batu Kota Batu telah didistribusikan dengan tepat, yaitu kepada masyarakat miskin atau masyarakat dengan perekonomian menengah kebawah. Masyarakat bersama-sama memanfaatkan dan mengelolah dana bantuan melalui program ini. Sehingga program ini dapat berkembang dengan baik berkat kerja-sama dan partisipasi masyarakat setempat.

d. Tepat Lingkungan

PNPM Mandiri Perkotaan di Kecamatan Batu Kota Batu dirasa sudah tepat lingkungan. Jumlah Rumah Tangga Miskin (RTM) di Kecamatan Batu yang terus bertambah menjadi perhatian pemerintah untuk segera ditanggulangi, sehingga penerapan PNPM Mandiri Perkotaan menjadi salah satu program yang diharapkan mampu menekan angka

RTM dan memperbaiki perekonomian masyarakat di Kecamatan Batu Kota Batu.

**Strategi Pemberdayaan** sebagai sebuah alternatif dalam perkembangan konsep pembangunan untuk mencari solusi terhadap kegagalan model pembangunan yang telah diterapkan sebelumnya. Tentu dalam penerapannya diperlukan adaptasi dan modifikasi, agar lebih sesuai dengan situasi dan lingkungan yang ada. Dalam kerangka itu, menurut Kartasmita (1996, h.23) pemberdayaan masyarakat harus dilakukan melalui 3 strategi/ cara, yakni melalui: *enabling, empowering & protection*. Pertama, menciptakan iklim yang memungkinkan potensi masyarakat berkembang (*enabling*). Kedua, penguatan potensi dan daya yang dimiliki oleh masyarakat (*empowering*). Ketiga, pemberdayaan bermakna melindungi (*protection*) dan keberpihakan terutama terhadap kelompok masyarakat miskin atau yang kurang berdaya, bagaimanapun juga sebagai sumber daya untuk memenuhi kebutuhan masyarakat bukan hanya terbatas dan langka, melainkan ada masalah struktural dalam bentuk ketimpangan, dominasi, hegemoni yang menimbulkan pembagian sumber daya secara tidak merata.

**Faktor Pendukung dan Faktor Penghambat dalam Pelaksanaan PNPM Mandiri Perkotaan di Kecamatan Batu Kota Batu.**

**Faktor Pendukung**

a) Partisipasi Masyarakat dan Dukungan dari Semua Pihak.

PNPM Mandiri Perkotaan di Kecamatan Batu sangat membutuhkan peran serta dari masyarakat setempat. Selain partisipasi dari masyarakat, dukungan dari berbagai pihak juga sangat dibutuhkan dalam kelancaran pelaksanaan program ini. Masyarakat Kecamatan Batu telah berhasil mengidentifikasi suatu masalah sosial, melahirkan potensi yang ada, berusaha mencari solusi pemecahan masalah sosial tersebut, mengimplementasikan program tridaya dengan baik, serta mengevaluasi hasil

program tersebut dengan baik pula. Ini membuktikan bahwa partisipasi masyarakat telah berkembang dengan baik di Kecamatan Batu Kota Batu.

- b) Sumber Dana yang Dikeluarkan dari Berbagai Pihak untuk Mendukung Pelaksanaan PNPM Mandiri Perkotaan.

Sumber dana merupakan faktor yang penting dalam menjalankan sebuah program. Sumber-sumber dana bagi pelaksanaan PNPM Mandiri tersebut digunakan untuk keperluan komponen-komponen program yaitu pengembangan masyarakat, Bantuan Langsung Masyarakat (BLM), peningkatan Kapasitas Pemerintahan dan Pelaku Lokal, dan Bantuan Pengelolaan, dan Pengembangan Program. Dengan disalurkan dana BLM, maka program tersebut dapat dijalankan. Sebab semua kegiatan didalam program ini memerlukan biaya. Pada dasarnya dana BLM hanya sebagai stimulan, artinya penyediaan stimulan dana BLM ini dimaksudkan agar masyarakat secara nyata dapat belajar melaksanakan dan mengelolah apa yang sudah direncanakan.

- c) Kedisiplinan Masyarakat dalam Mengangsur Dana Bergulir Kegiatan Ekonomi dalam PNPM Mandiri Perkotaan di Kecamatan Batu.

Meskipun tanpa jaminan jika ingin meminjam dana bergulir, masyarakat di Kecamatan Batu Kota Batu mampu mengangsur bulanan secara rutin, meskipun ada saja beberapa masyarakat yang terkadang terlambat membayar. Kedisiplinan masyarakat Kecamatan Batu Kota Batu dibuktikan dari hasil perkembangan dana untuk kegiatan daya ekonomi yang setiap tahunnya meningkat. Oleh sebab itu, kedisiplinan masyarakat Kecamatan Batu dalam mengangsur dana bergulir kegiatan daya ekonomi menjadi salah satu faktor pendukung implementasi PNPM Mandiri Perkotaan.

### **Faktor Penghambat**

- a) Kurangnya Pemahaman Sebagian Masyarakat tentang Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat di Kecamatan Batu.

Dalam kenyataan di lapangan, sebagian masyarakat kurang memahami tentang maksud dan tujuan dari PNPM Mandiri Perkotaan. Mereka menganggap bahwa penyaluran dana melalui program ini hanya sebatas bagi-bagi uang/pinjaman secara cuma-cuma. Tidak dapat dipungkiri bahwa berbagai program terdahulu sering menghasilkan kondisi yang kurang menguntungkan, hal ini justru mendorong pergeseran perilaku masyarakat yang tidak mandiri, sehingga masyarakat cenderung bersikap mengandalkan bantuan dari pihak luar untuk mengatasi berbagai persoalan yang dihadapi.

- b) Kurangnya Tanggung Jawab Sebagian Masyarakat dalam Pengembalian Dana Bergulir PNPM Mandiri Perkotaan.

Banyak masyarakat miskin yang merasa terdesak dalam keadaan perekonomian sehingga melakukan cara apapun untuk mendapatkan dana namun pada akhirnya tidak dapat mengembalikan dana tersebut. Meskipun dana PNPM Mandiri ini merupakan dana hibah yang tidak perlu dikembalikan pada pemerintah, namun pemerintah mengharapkan dana tersebut dapat dikembangkan oleh masyarakat sebagai bentuk pemberdayaan masyarakat untuk bersama-sama menang-gulangi kemiskinan.

### **Penutup**

Dapat disimpulkan bahwa PNPM Mandiri Perkotaan di Kecamatan Batu Kota Batu telah diimplementasikan secara aktif dan mandiri oleh masyarakat dan satuan kerja PNPM Mandiri Perkotaan yakni BKM/LKM beserta Pemerintah Daerah setempat. Hasil dari kegiatan Tridaya (daya ekonomi, daya sosial, daya fisik/lingkungan) telah menghasilkan dampak yang positif baik bagi masyarakat kecamatan Batu.

Dalam pelaksanaannya masih ditemui banyak masalah seperti pengembalian dana ekonomi bergulir yang macet sehingga dana menjadi terhambat untuk dikembangkan, penetapan besar bunga yang tidak sama dimasing-masing daerah, kegiatan sosial dengan pemberian pelatihan kepada masyarakat yang kurang sesuai dengan sumberdaya dan peluang yang ada sehingga produk mengalami masalah dalam pemasaran, tidak sesuai anggaran yang direncanakan dengan yang dikeluarkan pada saat pelaksanaan program karena anggota UPL yang dipilih kurang/tidak memahami dalam bidangnya sehingga kurang berkompeten.

Permasalahan diatas membuktikan bahwa implementasi PNPM Mandiri Perkotaan di Kecamatan Batu Kota Batu berjalan tidak sesuai dengan harapan. Meskipun sudah banyak hasil-hasil positif yang diperoleh masyarakat Kecamatan Batu melalui program ini, namun masih banyak hal yang perlu diperbaiki demi terwujudnya program agar berjalan dengan baik.

PNPM Mandiri Perkotaan di Kecamatan Batu Kota Batu telah memenuhi 4 "tepat" dalam kriteria implementasi kebijakan. Keempat tepat tersebut antara lain tepat kebijakan, tepat pelaksanaan, tepat sasaran, dan tepat lingkungan. PNPM Mandiri Perkotaan di Kecamatan Batu Kota Batu dilaksanakan oleh pemerintah dan masyarakat dalam rangka menanggulangi kemiskinan melalui kegiatan-kegiatan berbasis pembangunan ekonomi sosial dan lingkungan yang dilaksanakan secara swadaya.

Pengaruh dari faktor pendukung yaitu meningkatnya partisipasi masyarakat dan membangun masyarakat yang mandiri serta meningkatnya pendapatan dan berkembangnya program dimasing-masing kelurahan/desa yang ada di Kecamatan Batu. Sedangkan pengaruh dari faktor penghambat terhadap pelaksanaan PNPM Mandiri

Perkotaan yaitu kurangnya pemahaman masyarakat tentang maksud dan tujuan PNPM Mandiri Perkotaan sehingga mempengaruhi pola pikir masyarakat yang justru memahami program ini sebagai program bagi-bagi uang atau pinjaman cuma-cuma.

Dalam rangka menyempurnakan implementasi kebijakan pemberdayaan masyarakat melalui PNPM Mandiri Perkotaan di Kecamatan Batu Kota Batu, penulis memberikan beberapa saran yang bisa bermanfaat, antara lain:

1. Untuk pemberian besar pinjaman dan besar bunga yang dibebankan kepada penerima manfaat kegiatan ekonomi bergulir, seharusnya disamakan. Sehingga masyarakat mendapatkan manfaat dan tanggung jawab yang sama terhadap program tersebut.
2. Memberikan dana bantuan bukan hanya untuk masyarakat miskin, namun juga memberikan dana bantuan bagi masyarakat yang mempunyai usaha dengan potensi pasar yang baik, sehingga dana bantuan tersebut dapat dijadikan untuk mengembangkan usaha yang nantinya mampu menyerap pengangguran yang umumnya dari kalangan masyarakat kurang mampu. Artinya, pengusaha tersebut mampu menyediakan lapangan pekerjaan baru bagi masyarakat.
3. Sesuai dengan masalah kurangnya tanggung jawab sebagian masyarakat dalam pengembalian dana bergulir PNPM Mandiri Perkotaan, maka nantinya UPK dan anggota BKM/LKM selalu melakukan survey dan berhati-hati dalam memberikan pinjaman kepada penerima manfaat. Untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan, salah satunya adalah kemacetan pengelolaan dana bergulir untuk kegiatan ekonomi dalam Tridaya.



---

## Daftar Pustaka

- Hambali, Muhammad. (2008) “**Upaya Penanggulangan Kemiskinan**”, [Internet] Available from:<<http://marx83.wordpress.com/2008/07/05/upaya-penanggulangan-kemiskinan/>> [Accessed 9 Juli 2012]
- Muttaqin, Hidayatullah.(2012)**Kegagalan Model Pembangunan di Indonesia** [Internet] Available from: <[www.jurnal-ekonomi.org](http://www.jurnal-ekonomi.org)> [Accessed 12 September 2012]
- Kartasasmita, Ginanjar. (1996) **Pembangunan untuk Rakyat (Memadukan Pertumbuhan dan Pemerataan)**. Jakarta, CIDES
- Moleong, Lexy J. (2004) **Metodologi Penelitian Kualitatif**. Bandung, PT. Remaja Rosdakarya
- Nugroho, D. Riant.(2003) **Kebijakan Publik: formulasi, implementasi, dan evaluasi**. Jakarta, PT Elex Media Komputindo
- Pedoman Pelaksanaan P2KP2005**
- Pedoman Pelaksanaan PNPM Mandiri Perkotaan 2010**
- Saputro, Adi Maman. (2013)**Warga Miskin di Batu capai 34.400 Jiwa**. [Internet] Available from:<<http://daerah.sindonews.com>> [Accessed 13 September 2012]
- Suparlan, Parsudi. (1984)**Kebudayaan Kemiskinan dalam Kemiskinan di Perkotaan**. Jakarta, Yayasan Obor Indonesia – Sinar Harapan
- Wahab, Solichin A.(2011) **Analisis Kebijakan: dari Formulasi ke Implementasi Kebijakan Negara**. Jakarta, PT Bumi Aksara